

Women's History in the Pre-Independence Period and Its Involvement in Economic, Social, Politics, and Culture

Sejarah Perempuan Masa Pra Kemerdekaan dan Melibatkannya Perkembangan Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya

Baiq Ira Damayanty^{1*}

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

(*) Corresponding Author

baqiradamayanty261202@gmail.com

Abstract

Received: 2 April 2024

Revised: 18 April 2024

Accepted: 5 Mei 2024

Keywords:

Women's history, The Pre-Independence Period, Economic, Social, Political, Cultural Developments

The Indonesian women's movement has a long history from pre-independence until today. Demands for equality in the eyes of the law and politics have been fought since pre-independence. The struggle carried out by Indonesian women aims to strive for equal rights that were fought for before independence until now. A review of women's movement studies not only provides an overview of women's struggles but also explains the representation of the women's movement in history. History shows that Indonesian women fought fervently for humanity and social justice. This study aims to provide an understanding of history as a foundation for the current women's movement in fighting for social and political rights. Therefore, Indonesian women leaders have set an example that today's women have the responsibility to continue this struggle.

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia tidak lepas dari kontribusi perempuan yang berperan dalam membangun fondasi bangsa di tengah keterbatasan yang dihadapi. Pada masa pra-kemerdekaan, perempuan di Indonesia berperan dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian dan perdagangan hingga organisasi sosial dan gerakan politik. Meskipun ruang gerak mereka terbatas akibat tradisi patriarki dan kebijakan kolonial yang diskriminatif, perempuan terus memperjuangkan hak dan martabat mereka. Sejarah awal adanya perjuangan perempuan pada tahun 1928 yang di pelopori oleh Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928, sehingga pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu (Fauzia, 2022). Sejarah kebangsaan tidak terlepas dari sudut pandang perempuan, karena perempuan juga ikut andil dalam sejarah Indonesia (Huda & Dodi, 2020). Awal perjuangan perempuan dengan cara mendirikan berbagai organisasi perempuan dengan tujuan kemerdekaan (Huda, 2020). Perjuangan perempuan di Indonesia sejalan dengan perjuangan perempuan di berbagai negara lain, yang berupaya memperoleh hak-hak dasar mereka melalui pengalaman dan cara yang berbeda-beda (Rokhmansyah, 2016). Di Indonesia, upaya untuk mencapai kesetaraan sudah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan, ketika para perempuan memperjuangkan persamaan di hadapan hukum dan hak-hak politik (Fauzia, 2022).

Salah satu perempuan yang memperjuangkan kesetaraan perempuan yaitu Raden Ajeng Kartini. RA. Kartini memperjuangkan nasib perempuan yang pada saat itu pada masa penjajahan tidak diperhatikan terkait tentang pendidikan dan ketidak leluasaan kehidupan perempuan pada masa itu. RA Kartini memperjuangkan nasib perempuan Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang layak dan juga dapat melakukan berbagai kegiatan tanpa adanya peraturan yang membatasi ruang gerak dari perempuan Indonesia (Himmah, 2020). Untuk saat ini banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan dengan berbagai kasus yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dalam perceraian dan masih banyak perempuan hebat Indonesia yang bangkit untuk memperjuangkan haknya. Hingga saat ini kita masih menyaksikan adanya perjuangan menuju kesetaraan gender, hal ini belum bergerak secara sempurna. Komitmen negara terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender belum cukup kuat, masalah yang dihadapi perempuan seperti pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan serta pelecehan seksual,

perdagangan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja masih belum diatasi dengan baik (Darwin, 2004).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian sejarah bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu yang terkait dengan perjuangan perempuan Indonesia pada masa pra-kemerdekaan dan keterlibatan mereka dalam perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dinamika gerakan perempuan secara kontekstual dan komprehensif (Azizah 2020).

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat historis dan mengadopsi pendekatan analitis-deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis perjalanan sejarah perempuan Indonesia, terutama kontribusinya di berbagai sektor pada masa pra-kemerdekaan. Pendekatan ini dicapai melalui:

1. Pendekatan kronologis

Pendekatan ini digunakan untuk mengatur secara sistematis peristiwa sejarah perempuan dalam urutan kronologis, dimulai dari periode pra-kemerdekaan melalui dampaknya hingga saat ini.

2. Pendekatan tematik

Pendekatan ini berfokus pada tema-tema tertentu, seperti peran perempuan di sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya, yang memungkinkan pemahaman tematik yang lebih mendalam.

B. Jenis data dan sumber

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisis peran perempuan pada masa pra-kemerdekaan. Data sekunder meliputi dokumen dan buku sejarah, arsip organisasi perempuan, surat kabar kolonial, risalah kongres perempuan, jurnal ilmiah, artikel dan penelitian yang relevan dengan perjuangan perempuan Indonesia. Literatur ini memberikan perspektif lebih jauh untuk memahami dinamika perjuangan perempuan selama periode tersebut.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi bibliografi, khususnya dengan memeriksa sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Data diklasifikasikan menurut tema yang meliputi:

1. Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya.
2. Organisasi perempuan pra-kemerdekaan dan kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia.
3. Peran tokoh perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif historis, meliputi pengumpulan sumber data yang relevan dari berbagai arsip dan literatur (heuristik), verifikasi keaslian dan keabsahan data yang diperoleh untuk menjamin kualitas penelitian (kritik sumber), analisis data dari data yang diberikan secara mendalam untuk menemukan hubungan antara peristiwa, sejarah, dan perjuangan perempuan (interpretasi), serta penyusunan narasi sejarah berdasarkan data yang dianalisis (historiografi).

D. Validasi dan verifikasi data

Validasi dilakukan dengan memeriksa silang berbagai sumber sejarah untuk memastikan keakuratan informasi. Verifikasi data dilakukan dengan menguji validitas dokumen, relevansi data dengan topik penelitian, dan koherensi narasi sejarah. Diharapkan metode penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran perempuan Indonesia pada masa pra kemerdekaan dan relevansinya dalam perjuangan kesetaraan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal kata perempuan dari kata empuan, dengan adanya penghampiran kata menjadi Puan yang berarti kata sapaan yang hormat untuk perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia atau orang yang memiliki puki, dapat hamil, melahirkan, menstruasi dan juga menyusui. Pengertian perempuan selain yang dijelaskan diatas, perempuan merupakan seorang sosok yang memiliki sifat yang lembut dan juga dari kelembutannya terdapat keperkasaan dengan kekuatan dan potensi yang sangat luar biasa (Fajri, 2016). Dalam artian kedudukan dan peran perempuan dilihat dari biologis bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi dalam mahluk sosial yang memiliki kelengkapan akal dan budi yang memiliki persamaan yang hakiki dan seharusnya memiliki hak yang sama. Namun dapat dilihat seara fakta kesamaan hak yang dimiliki anatar perempuan dan laki-laki itu sama dengan dianggap bahwa perempuan merupakan warga kelas dua yang diartikan bahwa mengalami kesulitan dalam menikmati dan mendapatkan hak yang sama (Fauzia, 2022).

Perjuangan perempuan Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, khususnya pada abad ke-19, dimulai dengan kesadaran untuk memperoleh keadilan karena perempuan merasa tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Faktor-faktor ini mendorong perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka, yang turut mempengaruhi peristiwa politik. Semakin banyak perempuan terdidik dengan pemikiran kritis, permasalahan industri bermunculan, serta adanya peningkatan moral dalam masyarakat, gerakan kemerdekaan, dan pengaruh dari Barat. Pada masa itu, pergerakan perempuan Indonesia dalam melawan kolonialisme tampak dalam bentuk perang yang terkoordinasi, dengan perempuan berkontribusi di berbagai bidang untuk menghadapi penjajahan. Nama-nama pejuang seperti Christina Marta Tiahahu dari Maluku, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh, serta Nyai Ageng Serang dari Mataram mencerminkan perlawanan yang gigih. Raden Ajeng Kartini juga memperjuangkan hak perempuan, terutama dalam menghadapi diskriminasi gender yang terjadi pada masa itu. Pada awal 1900-an, berbagai organisasi perempuan mulai memperjuangkan nilai-nilai keluarga dan sosial, serta mempertahankan budaya asli Indonesia dengan melawan pengaruh budaya Barat yang dianggap tidak sesuai (Fauzia, 2022), gerakan ini mengedepankan nasionalisme.

1. *Poetri Mardika*

Organisasi perempuan pertama di Indonesia, Poetri Mardika, didirikan dengan dukungan dari Boedi Oetomo. Poetri Mardika merupakan organisasi yang bertujuan memberikan motivasi kepada perempuan pentingnya meningkatkan taraf hidup para perempuan baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial (Suryochondro, 1984). Poetri Mardika mencita-citakan kemajuan terhadap perempuan agar tidak lagi menjadi perempuan yang hanya terpaku mengikuti adat istiadat saja, melainkan sebagai perempuan diharuskan aktif dalam meningkatkan derajat mereka. Dalam artikel surat kabar tahun 1917, Rahardjo menyampaikan bahwa tujuan utama dari kemajuan yang ingin dicapai oleh Poetri Mardika adalah mendorong perempuan untuk menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, seperti yang dilakukan bangsa lain, agar perempuan dapat menjadi individu yang berpengetahuan dan mandiri (Rahardjo, 1917).

Sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia, Poetri Mardika menjalankan sejumlah agenda penting untuk mencapai cita-citanya. Pertama, mereka menyebarkan ide-ide emansipasi melalui media surat kabar yang mereka kelola sendiri. Surat kabar bernama Poetri Mardika ini berisikan tulisan-tulisan dari anggota organisasi, yang mencerminkan aspirasi, pandangan, serta keresahan mereka. Uniknya, Poetri Mardika tidak hanya memuat tulisan perempuan, tetapi juga menerima kontribusi dari laki-laki yang mendukung gerakan emansipasi. Kedua, organisasi ini menyediakan beasiswa bagi perempuan, sebagai langkah penting dalam melawan ketidakadilan yang diakibatkan oleh minimnya akses pendidikan bagi perempuan. Ini adalah upaya konkret untuk memberdayakan perempuan, memperluas cakupan pendidikan, dan melanjutkan semangat R.A. Kartini dalam perjuangan pendidikan perempuan di Indonesia. Dua kegiatan utama Poetri Mardika—penerbitan surat kabar untuk meningkatkan wawasan dan pemberian beasiswa—membuktikan bahwa organisasi ini sangat

serius dalam menggarap isu pendidikan perempuan. Media mereka bukan hanya sarana penyebaran informasi, tetapi juga wadah bagi anggota untuk belajar menulis dan berkomunikasi. Melalui beasiswa, Poetri Mardika membantu perempuan mengakses pendidikan yang lebih baik, menjadikan organisasi ini sebagai pionir dalam perjuangan pendidikan perempuan. Peran maupun kontribusi Poetri Mardika meliputi beberapa hal penting:

1. Menjadi inisiator bagi organisasi perempuan lain yang muncul setelahnya, serta memperkuat jaringan dengan kelompok-kelompok serupa melalui kegiatan kongres.
2. Menyebarkan gagasan kemajuan dan kesadaran nasional melalui surat kabar, yang juga menjadi media sosialisasi untuk memperkenalkan visi organisasi, terutama tentang pendidikan perempuan, keterbukaan, dan nasionalisme.
3. Mengedukasi perempuan akan pentingnya pendidikan setara dengan laki-laki di masa penjajahan, di mana perempuan Indonesia seringkali tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak.
4. Membantu perempuan melawan diskriminasi sosial dan adat yang membelenggu, seperti praktik poligami, pernikahan anak, dan kawin paksa.

Dengan upaya-upayanya, Poetri Mardika berhasil membuka akses bagi perempuan untuk merasakan pentingnya pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan era kolonialisme Belanda. Kehadiran Poetri Mardika serta gerakan perempuan di Indonesia berkaitan erat dengan pergerakan nasional maupun internasional yang berjuang untuk emansipasi, nasionalisme, dan pembebasan dari kolonialisme (Gardiner *et al.*, 2000).

2. Gerakan Perempuan Daerah

Setelah Poetri Mardika didirikan, muncul berbagai organisasi perempuan lainnya di tahun-tahun berikutnya, baik yang didukung oleh kelompok laki-laki maupun yang dibentuk oleh para perempuan secara mandiri. Contoh dari organisasi-organisasi ini antara lain Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun - PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah yang dibantu Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), dan Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924) (Wieringa, 1998). Secara umum, organisasi-organisasi tersebut memiliki basis lokal. Namun, tujuan utama mereka sama, yaitu meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat dengan memperbaiki akses pendidikan sebagai strategi dasar (Soetjipto, 2005). Di Sumatra, beberapa organisasi perempuan yang didirikan termasuk Kerajinan Amai Setia (KAS) pada tahun 1914, Keutamaan Istri di Medan, Istri Sumatera, PARMi Bagian Istri, dan Persatuan Istri Andalas. Di Sulawesi, PIKAT (Manado, 1917) dan Sarekat Rukun Istri (Makassar) merupakan dua organisasi perempuan yang muncul. Sementara itu, di Kalimantan terdapat organisasi Wanito Kencono, dan di Bali berdiri Perukunan Istri Denpasar.

Isteri Sedar, didirikan di Bandung pada 1930 oleh Suwarni Pringgodigdo, adalah organisasi perempuan yang berfokus pada perjuangan politik. Dalam kongresnya pada 1932, Isteri Sedar menegaskan bahwa tujuan mereka adalah meningkatkan status perempuan Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan. Organisasi ini meyakini bahwa tanpa kemerdekaan, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tidak mungkin tercapai, dengan menyatakan, "Hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha bersama kaum laki-laki dan perempuan yang bersatu yang akan mampu memberikan kesetaraan hak dan kesempatan kepada rakyat Indonesia" (Arivia, 2000).

3. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)

Gerwani adalah kelanjutan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang didirikan pada 4 Juli 1950 di Semarang (Diniah, 2007). Sebagai organisasi perempuan, Gerwani mengusung cita-cita agar perempuan dapat hidup mandiri, bekerja keras, dan berdaya, bukan sekadar mengikuti gaya hidup santai dengan fokus pada kekayaan namun tetap terbatas dalam kebebasan. Gerwani juga menentang pandangan bahwa perempuan hanya mengikuti suami atau menjadi bagian pelengkap dari suami mereka. Pada tahun 1955, Gerwani mulai mengarahkan perhatiannya pada pemilu, turut mendukung kampanye calon dari PKI, meskipun tidak mengajukan

kandidat sendiri. Saat itu, sekitar 23.480 anggota Gerwani ikut berpartisipasi dalam kampanye pemilu tersebut (Wieringa, 1998).

Gerwani yang berafiliasi dengan PKI sering kali melakukan protes keras terhadap pemerintah melalui aksi-aksi massa, terutama saat ada isu yang menyengsarakan rakyat kecil. Meski radikal, organisasi ini dikenal karena membela rakyat dan memperjuangkan keadilan, menjadikannya salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Gerwani juga menjadi saksi bahwa demokrasi yang baru berkembang di Indonesia saat itu memberi ruang bagi perempuan untuk berekspresi dan mengembangkan diri.

Pada tahun 1964, Gerwani menyusun program untuk memperluas kegiatannya di tengah dinamika politik. Program-program utama Gerwani meliputi:

a. **Hak-Hak Perempuan**

Memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki dalam politik, hak atas perlindungan pernikahan, hak kewarganegaraan bagi perempuan dalam pernikahan campuran, hak janda, hak perempuan buruh, serta hak perempuan dalam pemerintahan, kesehatan, dan pelaksanaan reformasi agraria. Tercatat ada 22 program yang difokuskan pada hak-hak perempuan.

b. **Hak-Hak Anak**

Gerwani juga memperjuangkan hak anak, yang erat kaitannya dengan peran perempuan sebagai ibu, seperti hak anak untuk bebas dari buta huruf, mendapatkan pendidikan, dan hiburan yang tidak mengandung unsur cabul atau propaganda perang.

c. **Hak Demokrasi, Kemerdekaan Nasional, dan Perdamaian**

Gerwani mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi dalam perjuangan nasional, termasuk dalam usaha pembebasan Irian Barat.

Gerwani aktif dari 1950 hingga 1965, tetapi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, Gerwani dibubarkan, seiring dengan runtuhnya PKI dan pemerintahan Soekarno. Sejarah Gerwani yang membentuk pandangan politik perempuan sebagai "ibu militan" berakhir dengan tragis. Kaum militer dan konservatif yang merasa terancam oleh peran aktif Gerwani dalam politik merekayasa stigma buruk terhadap organisasi ini, menggambarkannya sebagai "tidak bermoral" dengan simbol-simbol negatif seperti seks bebas dan kekejaman. Tindakan ini digunakan untuk menghapus keberanian perempuan dalam berpolitik dan menindas kebebasan perempuan. Di bawah pemerintahan Orde Baru, yang berorientasi pada modal, Gerwani dihapus dari sejarah gerakan perempuan di Indonesia (Soyomukti, 2009). Melalui aktivitasnya, Gerwani memberikan pelajaran sosial-politik yang berharga bagi perempuan, menunjukkan bahwa perempuan bisa berperan dalam pengambilan kebijakan publik. Mereka berhasil menepis anggapan bahwa perempuan tidak cocok untuk berpolitik, membuktikan bahwa perempuan mampu melakukan advokasi dan aktivisme yang cerdas, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Gerwani.

Seiring berjalannya waktu, berbagai organisasi perempuan nasionalis lainnya muncul, seperti *Jong Java Meiskering*, *Young Javanese Girls Circle*, *Wanita Oetomo*, *Aisyiah*, *Poetri Indonesia*, *Wanita Katolik*, *Wanita Muljo*, *Jong Islamieten Bond*, dan lainnya. Pada masa kolonial, gerakan perempuan bekerja sama dengan gerakan nasionalis untuk melawan ketidakadilan sistem kolonial serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan. Tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia terjadi dalam Kongres Perempuan I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, yang melahirkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), kemudian dikenal sebagai Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Kongres pertama PPII ini membahas isu-isu penting, termasuk pendidikan perempuan, perlindungan yatim piatu dan janda, pernikahan dini, reformasi undang-undang perkawinan Islam, harga diri perempuan, dan kejahatan kawin paksa. Pada kongres kedua PPII tahun 1930, perhatian tertuju pada perdagangan perempuan, hak suara perempuan, kebutuhan Kantor Penerangan Tenaga Kerja untuk perempuan, penelitian sanitasi di desa, dan tingginya angka kematian bayi. Menurut (Fauzia, 2022) ada empat bidang utama yang diperjuangkan oleh PPII, yaitu:

a. Keluarga dan Pendidikan

Meliputi kedudukan perempuan dalam pernikahan menurut Islam, perlindungan bagi perempuan dan anak dalam pernikahan, pencegahan pernikahan dini, serta pemberian beasiswa bagi anak perempuan.

b. Perburuhan

Pada tahun 1935 dibentuk badan terkait buruh perempuan, yaitu Badan Penyelidikan Perburuhan Kaum Perempuan, yang memperhatikan nasib buruh perempuan, termasuk buruh batik.

c. Pencegahan Perdagangan Anak, terutama Perempuan

Pada tahun 1929, PPII berupaya mengatasi perdagangan anak yang dilakukan sebagian orang tua untuk melunasi hutang pada pedagang Tionghoa, yang dikenal dengan istilah "Cina Minding."

d. Politik

Pada tahun 1941, terdapat dukungan untuk pergerakan kebangsaan melalui Gerakan Aksi Kemerdekaan Indonesia (GAKI) yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara parlementer.

Pada Kongres PPII tahun 1935, para perempuan menyatakan kewajiban utama mereka untuk menjadi "Ibu bangsa" dengan semangat nasionalisme yang kuat. Meski sudah beberapa dekade berlalu, topik ini masih relevan dalam konteks perempuan Indonesia saat ini. Jika hak politik perempuan diukur sebagai bagian dari hak asasi warga negara, era kebangkitan gerakan perempuan ini menandai awal perjuangan untuk memperoleh hak suara. Pada Kongres Perempuan Indonesia ke-3, isu hak suara mengemuka. Walaupun organisasi perempuan belum berhasil menempatkan Maria Ulfah di Volksraad, gagasan hak memilih dan dipilih tetap berkembang. Beberapa perempuan Indonesia bahkan terpilih sebagai anggota Dewan Kota. Pengakuan hak perempuan sebagai warga negara semakin kuat ketika Rasuna Said menjadi anggota Volksraad dan SK Trimurti menjadi anggota BPUPKI. Hak pilih penuh bagi perempuan Indonesia baru diwujudkan dalam Pemilihan Umum pertama pada 29 September 1955, yang memungkinkan politisi perempuan menduduki kursi parlemen.

Pada masa pendudukan Jepang, Jepang mendirikan organisasi perempuan seperti Barisan Poeteri Asia Raja (bagian dari Gerakan Tiga A), Barisan Pekerja Perempuan Poetera (bagian dari Poesat Tenaga Rakjat), dan Fujinkai. Saat itu, Jepang membubarkan organisasi perempuan lainnya dan mengintegrasikannya ke dalam satu wadah organisasi, yaitu Fujinkai Jawa Hokokai yang tersebar di seluruh wilayah yang dikuasai Jepang. Pada masa ini, perempuan diberi kesempatan mengasah mental dan fisik di bawah pengawasan Jepang, sambil tetap menjaga persatuan dengan pejuang perempuan lain secara sembunyi-sembunyi. Setelah kemerdekaan, berbagai organisasi perempuan muncul kembali, termasuk organisasi baru yang akhirnya membentuk federasi bernama Kowani pada tahun 1946 di Solo.

4. Peran Perempuan dalam Bidang Ekonomi

Pada masa kolonial, perempuan berperan besar dalam mendukung ekonomi keluarga dan komunitas. Di desa-desa, mereka bekerja di sektor agraris sebagai petani, buruh tani, atau peladang yang terlibat langsung dalam produksi pangan. Perempuan juga aktif dalam perdagangan di pasar-pasar lokal, khususnya di wilayah pesisir. Mereka menjual hasil bumi, kerajinan tangan, kain tenun, dan produk rumah tangga lain yang menopang ekonomi keluarga. Keterlibatan mereka di pasar tradisional memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi masyarakat dan menunjukkan kemampuan perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi.

Di beberapa wilayah, perempuan juga aktif dalam industri rumah tangga. Mereka memproduksi kain batik, tenun, dan berbagai kerajinan tangan, yang tidak hanya menjadi produk ekonomi tetapi juga bagian dari warisan budaya Indonesia. Peran perempuan ini menjadi penting dalam mempertahankan ekonomi keluarga dan komunitas lokal, bahkan ketika krisis ekonomi melanda akibat kebijakan kolonial yang merugikan. Peran ekonomi perempuan pada masa ini menegaskan kemampuan mereka dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat (Rahmadiyahsyah, 2022).

5. Peran Perempuan dalam Sosial dan Pendidikan

Pada masa pra-kemerdekaan, kesadaran perempuan untuk mengakses pendidikan mulai tumbuh, meskipun akses pendidikan untuk perempuan sangat terbatas. Tokoh-tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika menjadi pelopor pendidikan bagi perempuan. Kartini mendirikan sekolah yang menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak perempuan, mengajarkan mereka membaca, menulis, dan keterampilan hidup lainnya (Kartini, 1921). Inisiatif ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan kemampuan untuk berpendidikan, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang cerdas dan mandiri.

Organisasi perempuan juga mulai terbentuk, seperti *Putri Mardika*, yang mendorong pendidikan dan kesetaraan gender (Nur Iman Subono, 2002). Para perempuan dari berbagai daerah kemudian terinspirasi untuk membentuk organisasi serupa, di mana mereka bisa saling mendukung dan belajar bersama. Gerakan ini menjadi tonggak awal bagi perjuangan perempuan untuk hak pendidikan, sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam tatanan sosial masyarakat. Munculnya organisasi-organisasi ini menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan sosial terhadap perempuan, sekaligus membuka jalan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat.

6. Peran Perempuan dalam Bidang Politik dan Perjuangan Kemerdekaan

Selain bidang ekonomi dan pendidikan, perempuan Indonesia juga berperan dalam gerakan politik yang menentang penjajahan. Pada tahun 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, yang dihadiri oleh berbagai organisasi perempuan dari seluruh Indonesia. Kongres ini memperjuangkan berbagai isu, termasuk kesetaraan gender, hak atas pendidikan, dan, yang terpenting, dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam kongres ini, perempuan Indonesia menyatukan suara untuk melawan penindasan kolonial (Lestari, 2023).

Tokoh-tokoh perempuan juga ikut berjuang di medan perang, seperti Cut Nyak Dien dari Aceh dan Martha Christina Tiahahu dari Maluku. Mereka adalah simbol keberanian perempuan Indonesia dalam melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Di luar peran militer, banyak perempuan yang mendukung perjuangan kemerdekaan melalui jaringan logistik, membantu distribusi bahan makanan, serta merawat dan memberikan perlindungan bagi para pejuang. Peran politik perempuan ini memperkuat posisi mereka sebagai bagian penting dalam perjuangan nasional Indonesia. Mereka memainkan peran vital dalam mempertahankan semangat nasionalisme dan memperkuat jaringan perlawanan terhadap penjajah.

7. Peran Perempuan dalam Budaya dan Pelestarian Tradisi

Di bidang budaya, perempuan memiliki peran besar dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai adat. Mereka mengajarkan nilai-nilai budaya, bahasa, dan adat istiadat kepada anak-anak mereka, yang membantu mempertahankan identitas budaya di tengah pengaruh kolonial. Perempuan juga terlibat dalam kegiatan seni, seperti tari, musik, dan sastra (Rahardjo, 1993). Melalui keterampilan mereka, perempuan menjadi penjaga kebudayaan dan identitas lokal yang khas di berbagai daerah di Indonesia. Di tengah pengaruh budaya asing yang masuk melalui penjajah, perempuan menjadi penopang kebudayaan lokal. Mereka menjaga dan melestarikan seni batik, tenun, serta tari-tarian daerah. Beberapa di antaranya juga mulai berkontribusi dalam dunia sastra dengan menulis dan mengekspresikan pandangan mereka tentang kebebasan, hak asasi, dan kemerdekaan, yang memperkaya budaya dan literatur Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari surat-surat Kartini, yang berisi kritik terhadap ketidaksetaraan dan harapan untuk pendidikan serta kemajuan perempuan (Kartini, 1921).

KESIMPULAN

Sebelum kemerdekaan perempuan telah memperjuangkan haknya yang tidak didapat dan miliki kesamaan dengan laki-laki. Pada awalnya mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang

menjadi keinginan mereka. Perlakuan dan penyikapan terhadap perempuan yang jauh dari kata kemanusiaan membuat geram para perempuan yang telah lebih dahulu mengenyam pendidikan. Ketidakadilan yang ada, penindasan yang terjadi, dan akses yang tertutup bagi perempuan merupakan buah dari ketidaktahuan, kebodohan. Seiring dengan berkembangnya zaman perempuan di Indonesia mulai menyuarakan apa yang menjadi haknya melalui beberapa tokoh perempuan yang memperjuangkan hak perempuan pada bidangnya masing-masing. Perjuangan perempuan Indonesia ada salah satu tokoh yang sangat terkenal yaitu RA Kartini yang memperjuangkan perempuan dalam bidang pendidikan. Karena pada saat itu perempuan tidak memiliki hak untuk menempuh pendidikan kecuali keluarga dari darah biru.

Sebelum kemerdekaan sudah ada perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak mereka dan perjuangan itu masih ada hingga sekarang. Dengan nalar yang kritis, perasaan yang berbudi pekerti, perempuan dapat menangkis sekian banyak kemungkinan pengungkungan pada dirinya. Setiap gerakan perempuan yang pernah tertoreh dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, seluruhnya fokus pada isu pendidikan. Isu pendidikan dalam arti luas, layaknya Gerwani yang fokus pada pendidikan dan praktik sosial politik, tidak hanya seperti Poetri Mardika yang benar-benar menenggelamkan diri pada kerja-kerja pendidikan. Pergerakan perempuan yang tertangkap dengan baik oleh sejarah bangsa tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia pernah mengalami fase krisis keadilan pada perempuan, dan hal tersebut harus menjadi acuan pergerakan perempuan Indonesia hari ini. Demokrasi telah berjalan sekian lama, namun praktik ketidakadilan dalam versi dan bentuk yang berbeda selalu mungkin terjadi. Maka dari itu, para tokoh perempuan Indonesia telah mencontohkan, perempuan hari ini punya tanggung jawab melanjutkan perjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, G. (2000). Soekarno Dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan.
- Azizah, N. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Ana*, 2(2), 21-35.
- Darwin, M. (2004). Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. In *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Vol. 7, Pp. 283–294).
- Diniah, H. (2007). Gerwani Bukan PKI : Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar Di Indonesia. Carasvati Books.
- Fajri, D. Y. (2016). Hajar, Perempuan Pilihan Langit. Gema Insani.
- Fauzia, R. (2022). Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme. 1(4), 861–881.
- Gardiner, M. Oey, Sulastri, Sumardjo, J., Aripurnami, S., Bianpoen, C., Jaarsma, M., Rambe, H., Simamora, A. B., Marcoes-Natsir, L., Buchori, B., Soenarto, I., Hasibuan-Sedyono, C., Djamal, C., Sitepu, H. S., Hartiningsih, M. M., Suryochondro, S., Poerwandari, E. K., Rahman, A., Triwijati, E., ... Wagemann, M. L. E. (2000). Perempuan Indonesia: Dulu Dan Kini (S. Mayling Oey-Gardiner, Mildred L.E. Wagemann, Evelyn Suleeman (Ed.)). PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Himmah, F. (2020). Sejarah Perjuangan Raden Ajeng Kartini Dalam Kebangkitan Pendidikan Perempuan Di Jawa 1879-1904. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Huda, D. (2020). Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender : Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya. Cendekia Press.
- Kartini, R. A. (1921). Letters Of Javanese Princess. New York: W. W. Norton.
- Lestari, S. N. (2023). Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Ikip Pgri Wates, Diy.
- Nur Iman Subono. (2002). Perempuan Dan Ekologi. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan. Bengkel Aksara*.
- Rahardjo. (1917). Poetri Mardika. Wellevnbeid, 10.
- Rahardjo, S. (1993). Perempuan Dalam Masyarakat Jawa. Kanisius.

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 1 Nomor 2 Mei 2024

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

- Rahmadiyah, Y. (2022). *Perempuan Di Masa Kolonial Membayangkan Indonesia*. Jalastoria. <https://www.jalastoria.id/Perempuan-Di-Masa-Kolonial-Membayangkan-Indonesia/>
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca.
- Rohmansyah ; Rizki, D. (2024). Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam). *Mahakim: Jurnal of Islamic Family Law*, 8 (1), 41-60.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*. Buku Kompas.
- Soyomukti, N. (2009). *Perempuan Di Mata Soekarno*. Garasi.
- Suryochondro, S. (1984). *Potret Pergerakan Wanita Di Indonesia (Cetakan 1)*. Rajawali.
- Wieringa, S. (1998). *Kuntanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Kalyanamitra.